



**BUPATI PASER**  
**PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA  
PEMERINTAH KABUPATEN PASER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASER,

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Paser adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai;
  - b. bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5 /2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, Bupati wajib menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Pemerintah Kabupaten dan Satuan Kerja Perangkat Daerah serta unit kerja mandiri yang ada dibawahnya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Paser tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Paser.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1953) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PASER TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PASER.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Paser.
2. Bupati adalah Bupati Paser.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Perangkat Daerah.
5. Kinerja Perangkat Daerah adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan perangkat daerah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategis perangkat daerah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.
6. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang pendek dari tujuan.
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Paser
8. Bagian Organisasi dan Kerjasama adalah Bagian Organisasi dan Kerjasama Sekretariat Daerah Kabupaten Paser.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah:

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang diamanatkan dalam Dokumen RPJMD Kabupaten Paser; dan
- b. untuk mengukur keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja dalam periode Tahun 2017 – 2021.

### Pasal 3

Review Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh Perangkat Daerah untuk:

- a. menyusun Rencana Kerja dan Anggaran;
- b. pelaksanaan DPA;
- c. menyusun Rencana Aksi Kinerja;
- d. menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- e. menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja; dan
- f. melakukan evaluasi pencapaian kinerja berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Paser Tahun 2016 – 2021 yang disesuaikan dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang disusun setiap tahun.

## BAB III

### PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 5

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Bagian Organisasi.
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.

## BAB IV

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Paser.

Ditetapkan di Tana Paser  
pada tanggal 23 Oktober 2017

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

Diundangkan di Tana Paser  
pada tanggal 23 Oktober 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PASER,

AJI SAYID FATHUR RAHMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN PASER TAHUN 2017 NOMOR 46

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI PASER  
NOMOR 46 TAHUN 2017

TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN PASER

NO	URAIAN SASARAN	PENJELASAN / FORMULASI PENGHITUNGAN	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1	2	3	4	5
<b>Sasaran 1 : Meningkatnya Kualitas Jalan dan Jembatan</b>				
1	panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan kondisi baik}}{\text{Panjang jalan seluruhnya}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
2	Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 KM/Jam)	$\frac{\text{Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik}}{\text{Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3	Jalan Penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan pemukiman penduduk (minimal dilalui roda 4)	$\frac{\text{Jumlah kawasan pemukiman penduduk yang belum dilalui Kendaraan roda 4}}{\text{Jumlah seluruh kawasan pemukiman penduduk}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
4	Persentase akses jalan kabupaten yang beraspal	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten yg beraspal}}{\text{Panjang jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
5	Persentase panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik	$\frac{\text{Panjang jalan Kabupaten Dlm kondisi baik}}{\text{Panjang jalan Kabupaten}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
6	jumlah peningkatan jalan/jembatan/titian/semenisasi dan drainase yang dibangun	<u>jumlah peningkatan jalan/jembatan/titian/semenisasi dan drainase yang dibangun</u>	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
<b>Sasaran 2 : Meningkatnya Pelayanan Transportasi Publik</b>				
1	Tingkat kecelakaan lalu lintas jalan raya yang menyebabkan kematian	$\frac{\text{Jumlah kecelakaan lalu lintas jalan raya yang menyebabkan kematian}}{\text{Jumlah kecelakaan lalu lintas jalan raya}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	Jumlah pelanggaran lalu lintas jalan (mobil)	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran lalu lintas jalan di jalan protokol (mobil)}}{\text{Jumlah pengguna jalan protokol yg menggunakan mobil}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan

3	Pemasangan Rambu-rambu	$\frac{\text{Jumlah Pemasangan Rambu-rambu pada tahun } n}{\text{Jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
4	Jumlah terminal bus	Ketersediaan Terminal Bus	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
5	Sarana transportasi angkutan pedesaan	Jumlah angkutan pedesaan yang tersedia	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
<b>Sasaran 3 : Meningkatnya Keamanan dan Kenyamanan Pengguna Jalan</b>				
1	Tingkat keamanan dan kenyamanan Transportasi jalan	$\frac{\text{Jumlah komplain pengguna jalan yang masuk}}{\text{Jumlah pengguna jalan}} \times 100\%$	Dinas Perhubungan	Dinas Perhubungan
2	Panjang jalan yang diaspal (pengaspalan jalan baru) per kapita	Menunjukkan jalan baru yang diaspal perkapita	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
3	Tingkat kecepatan perbaikan/perawatan jalan beraspal yang rusak (jalan berlubang) setelah diketahui petugas /ada laporan masyarakat	Menunjukkan tingkat kecepatan perbaikan/perawatan jalan beraspal yang rusak (jalan berlubang) setelah diketahui petugas / ada laporan masyarakat	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
<b>Sasaran 4 : Meningkatnya Jangkauan Jaringan Komunikasi</b>				
1	Jumlah jaringan komunikasi	$\frac{\text{Jumlah jaringan telepon genggam Stasioner}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian
2	Persentase desa yang telah mempunyai jaringan telepon	$\frac{\text{Jmlh desa yg telah mempunyai jaringan Telp}}{\text{Jumlah Desa}} \times 100\%$	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian
3	Jumlah penyiaran TV lokal	Jumlah penyiaran TV lokal yang masuk ke daerah per tahun	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian
4	Jumlah surat kabar nasional / lokal	Jenis surat kabar nasional/lokal yang masuk ke daerah	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian
5	Jumlah penyiaran radio/TV lokal	Jumlah penyiaran radio/TV yang masuk ke daerah per tahun	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian
<b>Sasaran 5 : Meningkatnya Jangkauan Jaringan Internet</b>				
1	Website milik Pemerintah Daerah	Jumlah <i>Website</i> milik pemerintah daerah yg dimiliki	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian
2	Terpasangnya WiFi di tempat-tempat fasilitas umum	$\frac{\text{Jumlah titik WiFi yang sudah terpasang}}{\text{Jumlah titik WiFi yang direncanakan dipasang}} \times 100\%$	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian	Dinas Kominfo, Statistik & Persandian

<b>Sasaran 6 : Meningkatnya Akses Air Bersih</b>				
1	Rumah tangga pengguna air bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga menggunakan air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
2	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Pnjng drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Pencemaran status mutu air	$\frac{\text{Jmlh kawasan permukiman atau industri dan sumber data air yang terpantau mutu airnya}}{\text{Jumlah kawasan permukiman atau industri dan sumber mata air}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
4	Sumber air/mata air dalam kondisi baik/kondisi debit stabil	$\frac{\text{Panjang Sungai yg dibersihkan}}{\text{Total target panjang sungai yg akan dibersihkan}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
5	Persentase rumah tangga yang mempunyai akses terhadap air yang layak dikonsumsi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yang mempunyai akses Terhadap air yang layak dikonsumsi}}{\text{Jumlah rumah tangga}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
<b>Sasaran 7 : Meningkatnya Kawasan Pemukiman Rakyat yang Berwawasan Lingkungan dan Antisipatif Bencana</b>				
1	Persentase rumah tinggal bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tinggal berakses sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tinggal}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Drainase dalam kondisi baik/pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\frac{\text{Panjang drainase tersumbat pembuangan aliran air (Km)}}{\text{Panjang seluruh drainase di daerah kabupaten (Km)}} \times 100\%$	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang	Dinas Pekerjaan Umum & Tata Ruang
7				
<b>Sasaran 8 : Meningkatnya Kualitas Pemukiman Masyarakat</b>				
1	Persentase luas pemukiman yang tertata	$\frac{\text{Luas area permukiman yang tertata}}{\text{Luas area permukiman keseluruhan}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	Rasio permukiman layak huni	$\frac{\text{Luas permukiman layak huni}}{\text{Luas wilayah permukiman}} \times 100\%$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
3	Rasio Rumah layak huni	$\frac{\text{Jumlah Rumah layak huni}}{\text{Jumlah penduduk}}$	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan	Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan
4	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	$\frac{\text{Jmlh perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi}}{\text{Jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal}} \times 100\%$	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

<b>Sasaran 9 : Meningkatnya Angka Partisipasi Siswa Usia Sekolah</b>				
1	Angka melek huruf (AMH)	$\frac{\text{Jmlh slurh penduduk usia 15 thn ke ats dapat bca tulis}}{\text{Jmlh seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	Angka rata-rata lama sekolah	$\frac{\text{Jmlh selruh thn pnddikan pnduduk usia 15 thn ke ats}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
3	Angka partisipasi kasar SD/MI	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid sedang sekolah di SD/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4	Angka partisipasi kasar SLTP	$\frac{\text{Jmlh seluruh murid sedang sekolah di SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
5	Angka partisipasi kasar SLTA	$\frac{\text{Jmlh seluruh murid sedang sekolah di SMA/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 16 – 18 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
6	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A *	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid usia 7 – 12 tahun di SD/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
7	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	$\frac{\text{Jmlh seluruh murid usia 13 – 15 thn di SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
8	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	$\frac{\text{Jmlh sluruh murid usia 16 – 18 thn di SMA/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
9	Persentase anak dari keluarga miskin usia 7-18 yang bisa mengakses pendidikan (sekolah)	$\frac{\text{Jmlh seluruh murid dr keluarga miskin yg sedang skolah (SD/ sederaja, SLTP/ sederajat & SLTA/ sederajat)}}{\text{Jmlh seluruh ank dari keluarga miskin usia 7-18 thn}}$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
<b>Sasaran 10 : Meningkatnya Angka Partisipasi Anak Usia Dini</b>				
1	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah siswa pada jenjang TK/RA/ Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	Angka partisipasi sekolah (SD/MI)	$\frac{\text{Jmlh sswa kelpok usia 7-12 thn yg brsekolh di tngkt SD/MI}}{\text{Jumlah anak usia 4 – 6 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
<b>Sasaran 11 : Meningkatnya Angka Melek Huruf</b>				
1	Penduduk yang berusia >15 Tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jmlh Penduduk usia 15 thn ke ats dapat bca tulis}}{\text{Jmlh seluruh penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A *	$\frac{\text{Jumlah seluruh murid usia 7 – 12 tahun di SD/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
3	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/ Paket B	$\frac{\text{Jmlh seluruh murid usia 13 – 15 thn di SMP/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 13 – 15 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	$\frac{\text{Jmlh sluruh murid usia 16 – 18 thn di SMA/ sederajat}}{\text{Jumlah seluruh penduduk usia 16-18 tahun}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan

<b>Sasaran 12 : Meningkatnya Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan</b>				
1	Rasio guru terhadap murid	$\frac{\text{Jumlah guru SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah murid SMA/SMK/MA}} \times 10.000$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru berijazah kualifikasi S1/D-IV}}{\text{Jumlah guru SD/MI, SMP/MTs, SMA/SMK/MA}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
3	Rata-rata nilai Ujian Nasional SD/MI	Cukup Jelas	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
4	Rasio guru terhadap murid per kelas rata-rata	$\frac{\text{Jumlah guru sekolah pendidikan menengah per kelas}}{\text{Jumlah murid pendidikan menengah}} \times 100\%$	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
5	Rata-rata nilai Ujian Nasional SD/MI	Cukup Jelas	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
6	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMP/Mts	Cukup Jelas	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
7	Rata-rata nilai Ujian Nasional SMA/MA/SMK	Cukup Jelas	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
<b>Sasaran 13 : Berkembangnya Pelayanan Pendidikan yang Berdaya Saing</b>				
1	Penerapan sistem dan informasi manajemen pendidikan	Pemanfaatan sistem dan informasi dalam pelayanan pendidikan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
2	Sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) secara on line untuk semua	PPDB pada semua sekolah negeri menggunakan sistem secara on line	Dinas Pendidikan & Kebudayaan	Dinas Pendidikan & Kebudayaan
3				
<b>Sasaran 14 : Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Primer</b>				
1	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI) *	$\frac{\text{Jumlah desa / kelurahan UCI}}{\text{Seluruh desa / kelurahan}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan	$\frac{\text{Jumlah ibu melahirkan yang ditangani tenaga kesehatan selama 1 tahun}}{\text{Jumlah ibu melahirkan pada kurun waktu yg sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Cakupan pelayanan kesehatan rujukan pasien masyarakat miskin	$\frac{\text{Jmlh kunjungan pasien miskin di sarana ksehatan strata 1}}{\text{Jumlah seluruh pasien miskin di kabupaten/kota}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jmlh ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan



<b>Sasaran 15 : Meningkatnya Cakupan Jaminan Kesehatan Masyarakat</b>				
1	Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat perawatan	$\frac{\text{Jmlh balita gizi buruk mndapt perawatan di sarana pelyann kesehatan di satu wilayah krja pd kurun wkt tertentu}}{\text{Jmlh selruh balita gizi buruk yg ditemukn di satu Wilayah krja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Jumlah Rumah Sakit	Cukup Jelas	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Persentase penduduk miskin Kabupaten Paser yang berobat gratis melalui Jamkesda	$\frac{\text{Jumlah penduduk miskin yang berobat gratis (Jamkesda)}}{\text{Jumlah penduduk miskin Kab. Paser}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Rasio tenaga Kesehatan per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah tenaga kesehatan}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
			Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
<b>Sasaran 16 : Meningkatnya derajat kesehatan</b>				
1	Angka kematian ibu melahirkan (per 100.000 kelahiran hidup)	$\frac{\text{Banyaknya kematian ibu (saat hamil, melahirkan dan nifas) selama tahun tertentu}}{\text{Jumlah saat ibu hamil, melahirkan dan nifas}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Persentase kecamatan bebas rawan gizi	$\frac{\text{Jumlah kecamatan bebas rawan gizi}}{\text{Jumlah kecamatan}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Persentase balita gizi buruk	$\frac{\text{Jumlah Balita Gizi Buruk}}{\text{Jumlah Balita}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penderita DBD yang ditangani sesuai SOP di suatu wilayah kerja selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
<b>Sasaran 17 : Meningkatnya kualitas kesehatan keluarga</b>				
1	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit HIV/AIDS	$\frac{\text{Jumlah penderita HIV/AIDS yang ditangani sesuai SOP di suatu wilayah kerja selama tahun}}{\text{Jumlah penderita HIV/AIDS yang ditemukan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100\%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Rasio posyandu per satuan balita	$\frac{\text{Jumlah posyandu}}{\text{Jumlah balita}} \times 1.000$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan

<b>Sasaran 18 : Berkembangnya Pelayanan Kesehatan yang Berdaya Saing</b>				
1	Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	$\frac{\text{Jumlah ibu bersalin yang ditolong oleh tenaga kesehatan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama}} \times 100 \%$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
2	Rasio dokter per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah dokter}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 1000$	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
3	Jumlah Tenaga Medis	Jumlah Tenaga Medis	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
4	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling	Jumlah Puskesmas, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
<b>Sasaran 19 : Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>				
1	Tingkat produktifitas padi per hektar	$\frac{\text{Produktifitas Padi (ton)}}{\text{Luas Areal tanam padi (ha)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
2	Tingkat produksi bahan pangan utama lokal lainnya non padi per hektar	$\frac{\text{Produktifitas Lahan pangan utama lokal lainnya non padi (ton)}}{\text{Luas Areal tanam bahan pangan utama lokal lainnya non padi (ha)}} \times 100\%$	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
3	Jumlah kelompok tani	Jelas	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
4	Gabah (ton/gkg)	Produksi per hektar (produktifitas) gabah dalam ton x luas panen ( hektar )	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
5	Kontribusi produksi kelompok tani terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari produksi kelompok tani}}{\text{Jumlah PDRB}}$	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
7	Produksi daging (Ton/Th)	Jumlah produksi daging konsumsi per tahun	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
7	Produksi telur (Ton/Th)	Jumlah produksi telur per tahun	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
8	Produksi susu (liter/Th)	Jumlah produksi susu liter per tahun	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
9	Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sector pertanian}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100\%$	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
10	Jumlah produksi perikanan Jumlah produksi perikanan	Jumlah produksi ikan tangkap + produksi ikan budidaya per tahun	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
11	Jumlah produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi ikan tangkap per tahun	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
12	Jumlah produksi perikanan budidaya	Jumlah produksi ikan budidaya per tahun	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan

13	Persentase produksi perikanan kelompok nelayan	$\frac{\text{Jumlh produksi ikn (ton) kontribusi hasil kelompok nelayan}}{\text{Jumlh Produksi ikan di daerah}} \times 100\%$	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
14	Persentase jumlah nelayan yang dapat bantuan Pemda pada tahun (n)	$\frac{\text{Jmlh nelayan yg mendapat bantuan pemda pada thn n}}{\text{Jumlh kelompok nelayan}} \times 100\%$	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
15	Jumlah produksi ikan yang dipasarkan	$\frac{\text{Jumlh produksi ikan yg dipasarkan}}{\text{Jumlh Produksi ikan}} \times 100\%$	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
16	Persentase PAD dari sektor perikanan	$\frac{\text{Jumlh PAD Sektor perikanan}}{\text{Jumlh PAD}} \times 100\%$	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
<b>Sasaran 20 : Meningkatnya kualitas produk pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan</b>				
1	Cakupan bina kelompok petani	$\frac{\text{Jumlah kelompok petani yang mendapatkan bantuan dari pemda tahun n}}{\text{Jumlah kelompok petani}} \times 100 \%$	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
2	Cakupan bina kelompok nelayan	$\frac{\text{Jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan dari pemda tahun (n)}}{\text{Jumlh kelompok nelayan}}$	Dinas Perikanan	Dinas Perikanan
3	Rata-rata pendapatan per kapita petani	Pendapatan rata petani per tahun	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
4	Jumlah Kelompok Tani	Jelas	Dinas Pertanian	Dinas Pertanian
<b>Sasaran 21 : Berkembangnya Sektor Pariwisata</b>				
1	Jumlah Kunjungan wisata domestik da manca negara	Jumlah kunjungan wisatawan domestik dan manca Negara dalam 1 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	$\frac{\text{Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata}}{\text{Jumlah PDRB}} \times 100 \%$	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
3	Tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
<b>Sasaran 22 : Meningkatnya Kinerja UMKM</b>				

1	Jumlah Usaha Mikro dan Kecil	Jumlah usaha mikro dan kecil yang aktif	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi , UKM
2	Jumlah Usaha Menengah	Jumlah Usaha Menengah yang aktif	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi , UKM
3	Jumlah UKM yang melakukan pameran dan promosi di luar daerah pada tahun (n)	Menunjukkan jumlah UKM yang melakukan pameran dan promosi di luar daerah pada tahun (n)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi , UKM
4	Tingkat penyerapan tenaga kerja UMKM dari total tenaga kerja	Jumlah tenaga kerja yang terserap di bidang UMKM  ----- x 100 % Jumlah tenaga kerja	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi , UKM
5	Cakupan bina kelompok pengrajin pada tahun berjalan	Jumlah kelompok pengrajin yang dibina (mendapatkan bantuan Pemda) pada tahun n  ----- x 100 % Jumlah kelompok pengrajin yang ada	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi , UKM
<b>Sasaran 23 : Meningkatnya Akses Masyarakat Terhadap Pasar Tradisional</b>				
1	Tingkat pertumbuhan pasar tradisional	Jumlah pasar tradisional th (n) - Jumlah pasar tradisional th (n-1)  ----- x 100 Jumlah pasar tradisional th (n-1)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UKM
2	Tingkat kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar tradisional terjaga dengan baik	Menunjukkan terjaganya kebersihan, ketertiban, kenyamanan dan keamanan pasar yang ditunjukkan komplain masyarakat (pengunjung pasar)	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi,UKM
<b>Sasaran 24 : Meningkatnya koperasi aktif</b>				
1	Jumlah koperasi aktif	Jumlah koperasi yang melaksanakan RAT	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM
2	Prosentase koperasi aktif (melaksanakan RAT)	Jumlah koperasi aktif  ----- x 100 % Jumlah seluruh koperasi	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM
3	Jumlah anggota koperasi	Jelas	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM

4	Presentase koperasi yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri	$\frac{\text{Jumlah koperasi yang dapat menjalankan usahanya secara mandiri}}{\text{Jumlah koperasi}} \times 100 \%$	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM
<b>Sasaran 25 : Meningkatnya Kinerja Industri Kecil Menengah</b>				
1	Jumlah IKM	Jumlah IKM yang aktif dan Produktif Setiap Tahun	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM
2	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil Menengah (Tenaga Kerja)	%tase Penyerapan Tenaga Kerja dalam 1 tahun	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM
3	Persentase IKM yang memiliki TDI	$\frac{\text{Jumlah IKM yg memiliki TDI}}{\text{Jumlah Seluruh IKM}} \times 100 \%$	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM	Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi, UKM
<b>Sasaran 26 : Meningkatnya Kualitas Tenaga Kerja</b>				
1	Persentase jumlah tenaga kerja dibawah umur *	$\frac{\text{Pekerja anak usia 5 – 14 tahun}}{\text{Jumlah pekerja usia 5 tahun ke atas}} \times 100 \%$	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
2	Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia	$\frac{\text{Tenaga kerja yang dilatih}}{\text{Pendaftar pelatihan kewirausahaan}} \times 100 \%$	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
3	Persentase penduduk yang bekerja	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}}{\text{Jumlah angkatan kerja}} \times 100 \%$	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
4	Tingkat partisipasi angkatan kerja	$\frac{\text{Angkatan kerja usia 15 tahun ke atas}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas}} \times 100 \%$	Dinas Tenaga Kerja	Dinas Tenaga Kerja
<b>Sasaran 27 : Meningkatnya Kinerja BUMDes</b>				
1	Jumlah BUMDes dalam kategori sehat	Jelas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	$\frac{\text{Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh pemerintahan desa}} \times 100 \%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Berprestasi	$\frac{\text{Jumlah LPM Berprestasi}}{\text{Jumlah LPM}} \times 100 \%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

<b>Sasaran 28 : Meningkatnya Investasi</b>				
1	Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA)	Jumlah investor berskala nasional	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
2	Jumlah nilai investasi berskala nasional (PMDN / PMA)	Jumlah nilai investasi berskala nasional(PMDN/PMA) (Rp)	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3	Pameran investasi daerah yang dilaksanakan/diikuti dalam 1 tahun	Jelas	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
<b>Sasaran 29 : Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup</b>				
1	Persentase perusahaan yang telah mempunyai sistem pengelolaan limbah	$\frac{\text{Jumlah perusahaan yang memiliki sistem pengelolaan limbah}}{\text{Jumlah seluruh perusahaan}} \times 100 \%$	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	Cakupan pengawasan terhadap pelaksanaan Amdal	$\frac{\text{Jumlah perusahaan wajib Amdal yang telah diawasi}}{\text{Jumlah seluruh perusahaan wajib Amdal}} \times 100 \%$	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
3	Penegakan hukum lingkungan	$\frac{\text{Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan pemda}}{\text{Jumlah kasus lingkungan yang ada}} \times 100 \%$	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Sasaran 30 : Meningkatnya kualitas kawasan konservasi</b>				
1	Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	$\frac{\text{Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi}}{\text{Luas total hutan dan lahan kritis}} \times 100 \%$	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
2	Kerusakan kawasan hutan	$\frac{\text{Luas kerusakan kawasan hutan}}{\text{Luas kawasan hutan}} \times 100 \%$	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
<b>Sasaran 31 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Daerah</b>				
1	Peningkatan nilai dan predikat LKjIP	Nilai dan predikat hasil penilaian LKjIP oleh pihak-pihak berwenang	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
2	Persentase OPD yang menyusun LKjIP	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyusun LKjIP}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
3	Persentase OPD yang menyusun Perjanjian Kinerja (PK)	$\frac{\text{Jumlah OPD yang menyusun PK/Tapkin}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah

4	IKU yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati / Keputusan Bupati	Tersusunnya Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Daerah dan SKPD		
5	Persentase SKPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan baik	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang sudah menerapkan SAKIP dengan baik sesuai peraturan yang berlaku}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$	Setda, Bappeda dan Inspektorat	Setda, Bappeda dan Inspektorat
<b>Sasaran 32 : Meningkatnya Kemandirian Keuangan Daerah</b>				
1	Jumlah Sistem Informasi Keuangan Daerah	Tersedianya sistem pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel	BPKAD	BPKAD
2	Persentase SKPD yang menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan penyampaiannya tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang menyusun laporan keuangan sesuai ketentuan yang berlaku dan penyampaiannya tepat waktu}}{\text{Jumlah SKPD yang menyampaikan laporan keuangan}} \times 100 \%$	BPKAD	BPKAD
<b>Sasaran 33 : Meningkatnya Akses Terhadap Informasi Publik</b>				
1	Tersedianya informasi statistik daerah yang valid	Jumlah Dokumen informasi statistik Daerah	KOMINFOSTAPER	KOMINFOSTAPER
2	Persentase tingkat kemudahan akses informasi publik	$\frac{\text{Jumlah informasi publik yang diakses}}{\text{Jumlah seluruh informasi publik yg tersedia}} \times 100 \%$	KOMINFOSTAPER	KOMINFOSTAPER
3	Jumlah informasi publik/pembangunan daerah yang dimuat di media cetak dan online	Jumlah website/media cetak yang memuat informasi publik/pembangunan yang tersedia	KOMINFOSTAPER	KOMINFOSTAPER
4				
<b>Sasaran 34 : Meningkatnya Konsistensi antara Dokumen Perencanaan dan antara Perencanaan dengan Penganggaran</b>				
1	Persentase SKPD yang menyusun Renstra selaras dengan RPJMD	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang menyusun Renstra selaras dengan RPJMD}}{\text{Jumlah SKPD}} \times 100 \%$	BAPPEDA	BAPPEDA
2	Persentase SKPD yang menyusun Renja/RKT selaras dengan RKP	$\frac{\text{Jumlah SKPD yang menyusun Renja/RKT selaras dengan RKP}}{\text{Jumlah OPD}} \times 100 \%$	BAPPEDA	BAPPEDA

3	Jumlah dokumen Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	Tersedianya dokumen Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	BAPPEDA	BAPPEDA
<b>Sasaran 35 : Meningkatnya Sinergi antar Dokumen Perencanaan Lainnya</b>				
1	Persentase Kesesuaian dokumen tata ruang terhadap hasil pembangunan pada Tahun berjalan	Jelas	Dinas PU	Dinas PU
2				
3				
<b>Sasaran 36 : Meningkatnya Kapasitas Aparatur Pemerintah Daerah</b>				
1	Persentase pejabat struktural yang lulus Diklatpim sesuai eselon	$\frac{\text{Jumlah pejabat struktural yang lulus Diklatpim sesuai eselon}}{\text{Jumlah pejabat struktural yang telah mengikuti Diklatpim}} \times 100 \%$	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
2	Persentase PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya	$\frac{\text{Jumlah PNS yang mempunyai latar belakang pendidikan sesuai dengan tugas yang menjadi tanggungjawabnya}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100 \%$	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
3	Persentase PNS yang mengikuti/ lulus diklat (non diklatpim) yang dapat mengimplementasikan hasil diklat	$\frac{\text{Jumlah PNS yang mengikuti/ lulus diklat (non diklatpim) yang dapat mengimplementasikan hasil diklat}}{\text{Jumlah PNS yang ikut diklat (non diklatpim)}} \times 100 \%$	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
4	Persentase PNS yang berpendidikan S2	$\frac{\text{Jumlah PNS yang berpendidikan S2}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100 \%$	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan
5	Persentase PNS yang berpendidikan S1	$\frac{\text{Jumlah PNS yang berpendidikan S1}}{\text{Jumlah PNS}} \times 100 \%$	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan	Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan



<b>Sasaran 37 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik</b>				
1	Persentase jumlah permohonan KK/KTP yang dilayani sesuai standar pelayanan	$\frac{\text{Jumlah permohonan KK/KTP yang dilayani sesuai standar pelayanan}}{\text{Jumlah seluruh permohonan KK/KTP}} \times 100 \%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Persentase jumlah permohonan perizinan yang dilayani sesuai standar pelayanan	$\frac{\text{Jumlah permohonan perizinan yang dilayani sesuai standar pelayanan}}{\text{Jumlah seluruh permohonan perizinan}} \times 100 \%$	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
3	Indeks Kepuasan Masyarakat	Ada atau tidaknya survey Indeks Kepuasan Layanan Masyarakat di Pemerintah Daerah	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
4	Persentase pengaduan masyarakat tentang layanan publik yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah pengaduan pelayanan publik yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah seluruh pengaduan pelayanan publik}} \times 100 \%$		
<b>Sasaran 38 : Terciptanya birokrasi yang bersih dan dipercaya masyarakat</b>				
1	Persentase Pegawai yang telah menyampaikan LHKPN (eselon III ke atas)	$\frac{\text{menyampaikan LHKPN}}{\text{Jumlah seluruh PNS eselon III ke atas}} \times 100 \%$	Inspektorat	Inspektorat
2	Jumlah SKPD yang ditetapkan sebagai Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK/WBBM) pada tahun x	SKPD yang dipilih dan ditetapkan sebagai Zona Integritas dengan Keputusan Bupati	Inspektorat	Inspektorat
<b>Sasaran 39 : Meningkatnya Partisipasi Publik</b>				
1	Persentase Swadaya Masyarakat terhadap Program pemberdayaan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah swadaya masyarakat mendukung program pemberdayaan masyarakat}}{\text{Total program pemberdayaan masyarakat}} \times 100 \%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
2	Jumlah fasilitas umum di desa yang diselesaikan secara gotong royong	Cukup jelas	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
3	Cakupan sarana prasarana perkantoran pemerintahan desa yang baik	$\frac{\text{Jumlah kantor pemerintahan desa yang baik}}{\text{Jumlah seluruh pemerintahan desa}} \times 100 \%$	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

<b>Sasaran 40 : Meningkatnya akses masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan</b>				
1	Jumlah RTS Miskin yang mendapatkan bantuan Raskin dalam tahun x	Jumlah RTS Miskin yang mendapatkan bantuan dalam tahun x	Dinas Sosial	Dinas Sosial
2	Persentase PMKS yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang terpenuhi kebutuhan dasarnya}}{\text{Jumlah target PMKS yang ditangani}} \times 100 \%$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
3	Penanganan penyandang masalah kesejahteraan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yang mampu menjalankan fungsi sosialnya}}{\text{Jumlah target PMKS yang ditangani}} \times 100 \%$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
4	Penurunan PMKS	$\frac{\text{Jumlah PMKS Tahun (n-1)} - \text{Jumlah PMKS tahun (n)}}{\text{Jumlah PMKS tahun (n)}} \times 100 \%$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
<b>Sasaran 41 : Meningkatnya akses perempuan untuk berpartisipasi dalam berbagai proses pembangunan</b>				
1	Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga pemerintah}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Persentase partisipasi perempuan di lembaga legislatif	$\frac{\text{Pekerja perempuan di lembaga legislatif}}{\text{Jumlah pekerja perempuan}} \times 100 \%$	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Persentase perempuan yang menjabat eselon II, III dan IV	$\frac{\text{Jumlah perempuan yang menjabat eselon II, III dan IV}}{\text{Jumlah PNS perempuan}} \times 100 \%$	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

<b>Sasaran 42 : Meningkatnya peran serta pemuda dalam pembangunan</b>				
1	Persentase jumlah pemuda terampil	$\frac{\text{Jumlah pemuda dilatih yang mengembangkan hasil pelatihan}}{\text{Jumlah pemuda yang dilatih}} \times 100 \%$	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2	Persentase organisasi pemuda aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda terdaftar}}{\text{Jumlah organisasi pemuda}} \times 100 \%$	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
<b>Sasaran 43 : Meningkatnya Promosi Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Pembangunan</b>				
1	Penyelenggaraan festival seni dan bu	Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya dalam 1 tahun	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata	Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata
2	Tersedianya sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3	Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan	$\frac{\text{Jumlah Benda, situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan}}{\text{Total benda, situs dan kawasan yang dimiliki daerah}} \times 100 \%$	Dinas Pariwisata	Dinas Pariwisata
<b>Sasaran 44 : Meningkatnya Kerukunan, Keamanan dan Ketertiban Masyarakat</b>				
1	Angka kriminalitas	$\frac{\text{Jumlah tindak kriminal yang terjadi selama 1 tahun}}{\text{Jumlah penduduk seluruhnya}} \times 10.000$	Satpol PP	Satpol PP
2	Angka kriminalitas yang tertangani	$\frac{\text{Jumlah kriminalitas yang tertangani selama 1 tahun}}{\text{Jumlah kriminalitas yang ada selama 1 thn}} \times 100 \%$	Satpol PP	Satpol PP
3	Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah polisi pamong praja}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 10.000$	Satpol PP	Satpol PP

<b>Sasaran 45 : Meningkatnya Akses Bantuan bagi Masyarakat yang Terkena Bencana Sosial</b>				
1	Cakupan pelayanan bencana kebakaran kabupaten	$\frac{\text{Jumlah mobil PMK}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100 \%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	$\frac{\text{Jumlah kebutuhan dasar yang disediakan}}{\text{Jumlah kebutuhan dasar yang diperlukan}} \times 100 \%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Tingkat pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana	Sarana dan prasarana yang diperbaiki pasca bencana	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Sasaran 46 : Meningkatnya Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Alam</b>				
1	Tingkat waktu tanggap (response time rate) daerah layanan Wilayah Manajemen Kebakaran (WMK	$\frac{\text{Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran (WMK)}}{\text{Luas wilayah kabupaten}} \times 100 \%$	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
2	Jumlah Sosialisasi penanggulangan bencana yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Cukup Jelas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
3	Jumlah Simulasi saat terjadinya bencana yang dilaksanakan dalam 1 tahun	Cukup Jelas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
4	Persentase pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana	Cukup Jelas	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
<b>Sasaran 47 : Meningkatnya perlindungan Sosial Bagi Masyarakat</b>				
1	Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan panti rehabilitasi	$\frac{\text{Panti sosial yang menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}}{\text{Panti sosial yang seharusnya menyediakan sarana prasarana pelayanan kesejahteraan sosial}} \times 100 \%$	Dinas Sosial	Dinas Sosial
2	Prosentase penduduk mempunyai jaminan sosial	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memperoleh jaminan sosial}}{\text{Jumlah seluruh penduduk yang seharusnya memperoleh jaminan sosial}} \times 100 \%$	Dinas Sosial	Dinas Sosial

<b>Sasaran 48 : Meningkatnya Perlindungan Bagi Perempuan</b>				
1	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	$\frac{\text{Jmlh pengaduan/laporn yg ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jmlh pengaduan/laporan yg masuk ke unit pelayann terpadu}} \times 100\%$	DPPKB	DPPKB
2	Rasio KDRT	$\frac{\text{Jumlah KDRT}}{\text{Jumlah Rumah Tangga}} \times 100\%$	DPPKB	DPPKB
<b>Sasaran 49 : Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak</b>				
1	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	$\frac{\text{Jmlh pengaduan/laporn yg ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jmlh pengaduan/laporan yg masuk ke unit pelayann terpadu}} \times 100\%$	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2	Penyelesaian pengaduan perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan	$\frac{\text{Jmlh pengaduan/laporan yang ditindaklanjuti oleh unit pelayanan terpadu}}{\text{Jumlah pengaduan / laporan yang masuk keunit pelayanan terpadu}} \times 100\%$	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
<b>Sasaran 50 : Meningkatnya ketersediaan data kependudukan yang selalu diperbaharui</b>				
1	Rasio penduduk ber-KTP per satuan penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk > 17 tahun yang berKTP}}{\text{Jumlah penduduk > 17 tahun atau telah menikah}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
2	Rasio pasangan berAkte Nikah	$\frac{\text{Jumlah pasangan nikah berakte nikah}}{\text{Jumlah keseluruhan pasangan nikah}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3	Kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki KTP}}{\text{Jumlah penduduk usia > 17 dan atau pernah /sudah menikah}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
4	Persentase jumlah pelayanan dibidang pendaftaran pendudukan yang telah sesuai dengan standar pelayanan yang telah ditetapkan	$\frac{\text{Jumlah pelayanan dibidang pendaftaran pendudukan yang telah sesuai dengan standar pelayanan yg telah ditetapkan}}{\text{Jumlah seluruh pelayanan dibidang pendaftaran pendudukan yang telah dilaksanakan}}$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
5	Ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Menunjukkan ketersediaan database kependudukan skala provinsi	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

6	Kepemilikan akta kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki akta kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Rasio bayi berAkte Kelahiran	$\frac{\text{Jumlah bayi lahir yang mempunyai akte Kelahiran}}{\text{Jumlah keseluruhan bayi lahir}} \times 100\%$	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
<b>Sasaran 51 : Meningkatnya Pengendalian dan Pengelolaan Migrasi</b>				
1	Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM & TU )	$\frac{\text{Jumlah Transmigrasi swakarsa (transmigrasi umum, TSM \& TU )}}{\text{Jumlah Transmigrasi}} \times 100 \%$	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

BUPATI PASER,

YUSRIANSYAH SYARKAWI

<b>Sasaran 2 : Pengembangan Usaha Kecil dan Menengah</b>				
1	Omset UMKM	Jumlah Omset Seluruh UMKM yang ada dalam 1 Tahun (Rupiah)	Untuk mengetahui Omset UMKM	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	Jumlah UMKM	Jumlah UMKM yang aktif dan Produktif Setiap Tahun	Untuk mengetahui Jumlah UMKM yang aktif dan Produktif	Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	%tase IKM Formal (memiliki izin)	$\frac{\text{Jumlah IKM yang Memiliki Izin}}{\text{Jumlah IKM yang ada}} \times 100\%$	Untuk mengetahui IKM Formal yang mempunyai Izin	Dinas Perindustrian dan Energi
4	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja pada Usaha Kecil Menengah dan Usaha Mikro (Tenaga Kerja)	Jumlah Tenaga Kerja yang terserap pada UKM dan Usaha Mikro	Untuk menilai penyerapan tenaga kerja pada usaha kecil dan usaha mikro	Dinas Perindustrian dan Energi

### **Sasaran 3 : Pengembangan Industri Kecil**

1	Pertumbuhan Industri	$\frac{\text{Jumlah Industri Tahunn 2015}-\text{Jumlah Industri Tahun2014}}{\text{Jumlah Industri s/d Tahun 2014}} \times 100\%$		Dinas Perindustrian dan Energi
2	Omset IKM	Jumlah Omset Seluruh IKM yang ada dalam 1 tahun (Rupiah)	Untuk Mengetahui Omset IKM	Dinas Perindustrian dan Energi
3	Jumlah IKM	Jumlah IKM yang aktif dan Produktif Setiap Tahun	Untuk mengetahui Jumlah IKM yang aktif dan Produktif	Dinas Perindustrian dan Energi

<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>
4	Produk Unggulan Daerah	Jumlah produk unggulan daerah	Untuk menilai kemampuan teknologi industri	Dinas Perindustrian dan Energi
5	Tingkat Penyerapan Tenaga Kerja pada Industri Kecil Menengah (Tenaga Kerja)	%tase Penyerapan Tenaga Kerja dalam 1 tahun	Untuk menilai ketersediaan sentra industri kecil	Dinas Perindustrian dan Energi
6	%tase IKM yang memiliki TDI	$\frac{\text{Jumlah IKM yg memilik TDI}}{\text{Jumlah seluruh IKM}} \times 100\%$		Dinas Perindustrian dan Energi

<b>Sasaran 4 : Peningkatan Peran Koperasi dan Peningkatan Keterampilan Masyarakat</b>				
1	Koperasi sehat	$\frac{\text{Jumlah Koperasi Sehat}}{\text{Jumlah Seluruh Koperasi}}$	X 100%	Untuk menilai peningkatan kemampuan teknis, manajerial dan permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
2	Koperasi yang melakukan RAT	$\frac{\text{Jumlah Koperasi yang SHU nya meningkat}}{\text{Jumlah Koperasi Aktif}}$	X 100%	Untuk menilai peningkatan kemampuan teknis, manajerial dan permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
3	Jumlah SDM pengelola Koperasi terlatih	$\frac{\text{Jumlah SDM Pengelola Koperasi yg terlatih}}{\text{Jumlah seluruh SDM pengelola koperasi}}$	X 100%	Untuk menilai peningkatan kemampuan teknis, manajerial dan permodalan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dan Koperasi Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
4	Koperasi aktif	$\frac{\text{Jumlah koperasi yg berkembang jenis dan skala usaha koperasi}}{\text{Jumlah Koperasi}}$	X 100%	Untuk mengukur peningkatan kinerja koperasi dalam hal jenis dan skala usaha Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM
<b>Sasaran 5 : Terpenuhinya Pelayanan Kesehatan yang Bermutu</b>				
1	Angka Kematian Ibu (AKI)	$\frac{\text{Jumlah kematian ibu dalam masa kehamilan atau dalam waktu 42 hari setelah berakhirnya kehamilan dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah kelahiran hidup disatu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama}}$	X 100rb KH	Untuk menilai tingkat derajat kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan
2	Angka Kematian Bayi (AKB)	$\frac{\text{Jumlah kematian bayi sejak lahir hingga 1 tahun oleh karena proses persalinan atau penyakit}}{\text{Jumlah kelahiran hidup disatu wilayah kerja dlm kurun waktu yg sama}}$	X 1000 Pndudk	Untuk menilai tingkat derajat kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan
3	Angka Kematian Balita (AKABA)	$\frac{\text{Jumlah kematian Balita 1 tahun s.d 5 tahun oleh karena penyakit dalam kurun waktu 1 tahun}}{\text{Jumlah balita di satu wilayah kerja dalam kurun waktu yg sama}}$	x 100%	Untuk menilai tingkat derajat kesehatan masyarakat Dinas Kesehatan

1

2

3

4

5



4	Cakupan Balita Gizi Buruk yang mendapat perawatan	$\frac{\text{Jumlah gizi buruk yg mendapat perawatan di sarkes}}{\text{Jumlah seluruh bayi yg gizi buruk yg terdeteksi}} \times 100\%$	x 100%	Untuk menilai tingkat derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
5	Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan UCI}}{\text{Seluruh Desa/Kelurahan}}$	X 100%	Untuk menilai tingkat derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
6	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	$\frac{\text{Jumlah penanganan penderita TBC disatu wilayah dalam satu tahun}}{\text{Jumlah penderita TBC yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama}}$	X 100%	Untuk menilai tingkat derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
7	Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit DBD	$\frac{\text{Jumlah penanganan penderita DBD disatu wilayah dalam satu tahun}}{\text{Jumlah penderita DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam waktu satu tahun yang sama}}$	X 100%	Untuk menilai tingkat derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
8	Cakupan kunjungan bayi	$\frac{\text{Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kesehatan sesuai standar disatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu}}{\text{Jumlah seluruh bayi lahir hidupdi satu wilayah kerja pd Kurun waktu yang sama}}$	X 100%	Untuk menilai tingkat derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
9	Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani			Untuk menilai tingkat derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
10	Cakupan persalinan oleh tenaga kesehatan (PN)			Untuk menilai tingkat derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
11	Usia harapan hidup	$\frac{\text{Jumlah penduduk yang memiliki usia diatas usia harapan hidup Kab. Paser}}{\text{Jumlah penduduk}}$	X 100%	Untuk menilai tingkat derajat kesehatan masyarakat	Dinas Kesehatan
<b>Sasaran 6 : Meningkatkan Pelayanan Pendidikan Dasar yang Bermutu dan Merata</b>					
1	Angka kelulusan SD/MI	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SD/MI}}{\text{Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SD/MI pada tahun ajaran sebelumnya}}$	X 100%	Untuk mengukur peningkatan kualitas wajib belajar 12 tahun	Dinas Pendidikan
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMP/MTs pada tahun ajaran sebelumnya}}$	X 100%	Untuk mengukur peningkatan kualitas wajib belajar 12 tahun	Dinas Pendidikan
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah lulusan pada jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah Siswa tingkat tertinggi pada jenjang SMA/SMK/MA pada tahun ajaran sebelumnya}}$	X 100%	Untuk mengukur peningkatan kualitas wajib belajar 12 tahun	Dinas Pendidikan
4	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah siswa lulus SD/MI pada wilayah tertentu dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang SMP/MTs dlm tahun yg sama}}$	X 100%	Untuk mengukur peningkatan kualitas wajib belajar 12 tahun	Dinas Pendidikan
5	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah siswa lulus SMP/MTs pada wilayah tertentu dalam 1 tahun}}{\text{Jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK/MA pada tahun yg sama}}$	X 100%	Untuk mengukur peningkatan kualitas wajib belajar 12 tahun	Dinas Pendidikan

		<i>Jumlah siswa yang melanjutkan ke jenjang SMA/SMK dlm tahun yg sama</i>		
6	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	$\frac{\text{Jumlah Putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMA/SMK/MA}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMA/SMK/MA}} \times 100\%$	Untuk menilai tingkat kelanjutan sekolah	Dinas Pendidikan
7	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	$\frac{\text{Jumlah Putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs}} \times 100\%$	Untuk menilai tingkat kelanjutan sekolah	Dinas Pendidikan
8	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	$\frac{\text{Jumlah Putus sekolah pada tingkat dan jenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah siswa pd tingkat yang sama dan jenjang SMP/MTs}} \times 100\%$	Untuk menilai tingkat kelanjutan sekolah	Dinas Pendidikan
9	Angka Partisipasi Anak Sekolah - Usia 7 - 12 - Usia 13-15 - Usia 16-18 - Usia 19-24	Jumlah kegiatan yg diikuti dalam 1 tahun	Untuk mengukur Partisipasi sekolah	Dinas Pendidikan
10	Angka Partisipasi Murni (APM)) SMA/SMK/MA/Paket C	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 16-18 thn dijenjang SMA/SMK/MA/Paket C}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 16-18 thn}} \times 100\%$	Untuk mengukur Partisipasi sekolah	Dinas Pendidikan
11	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 thn dijenjang SMP/MTs}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 13-15 thn}} \times 100\%$	Untuk mengukur Partisipasi sekolah	Dinas Pendidikan
12	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 thn dijenjang SD/MI}}{\text{Jumlah penduduk kelompok usia 7-12 thn}} \times 100\%$	Untuk mengukur Partisipasi sekolah	Dinas Pendidikan
13	Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf (tidak buta aksara)	$\frac{\text{Jumlah Penduduk yang berusia >15 tahun melek huruf}}{\text{Seluruh jumlah penduduk}} \times 100\%$	Untuk mengukur angka buta aksara	Dinas Pendidikan
14	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	$\frac{\text{Jumlah Siswa pada jenjang TK/RA/Penitipan Anak}}{\text{Jumlah anak usia 4-6 tahun}} \times 100\%$		Dinas Pendidikan
15	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	$\frac{\text{Jumlah guru yg S1/D-iv}}{\text{Jumlah seluruh guru}} \times 100\%$	Untuk mengukur kualifikasi guru	Dinas Pendidikan
16	Angka melek huruf	$\frac{\text{jumlah penduduk (usia diatas 15 tahun ) yang bisa menulis pd tahun tertentu}}{\text{Jumlah penduduk usia 15 tahun keatas}} \times 100\%$	Untuk mengukur angka melek huruf	Dinas Pendidikan
17	Rata - rata lama sekolah anak usia diatas 15 Tahun	$\frac{\text{Jumlah penduduk 15 tahun keatas yg sedang sekolah/telah berijazah x lama pendididkan yg dihabiskan}}{\text{Jumlah penduduk 15 tahun keatas}} \times 100\%$	Untuk mengukur peningkatan kualitas wajib belajar 12 tahun	Dinas Pendidikan

		Jumlah penduduk 15 tahun keatas yg sedang sekolah/telah berijazah		
<b>Sasaran 7 : Tersedianya Pusat-Pusat Latihan Keterampilan</b>				
1	Jumlah pusat-pusat latihan keterampilan yang tersedia - Pelatihan Komputer - Pelatihan Mengemudi	Jumlah pusat-pusat latihan keterampilan		Dinas Tenaga Kerja
2	Terlatihnya calon tenaga kerja yang berkompentensi	$\frac{\text{Jumlah tenaga kerja yg mempunyai keahlian}}{\text{Seluruh jumlah tenaga kerja}} \times 100\%$		Dinas Tenaga Kerja
<b>Sasaran 8 : Terbangunnya Sistem Perlindungan Sosial</b>				
1	Persentase kepemilikan KTP	$\frac{\text{Jumlah penduduk ygb memiliki KTP}}{\text{Jumlah pendudduk wajib KTP > 17 tahun dan atau pernah/sudah menikah}} \times 100\%$	Untuk mengukur jumlah kepemilikan KTP bagi penduduk Kab. Paser	Dinas Kependudukan

1	2	3	4	5
2	Kepemilikan Akta Kelahiran per 1000 penduduk	$\frac{\text{Jumlah penduduk usia 0-1 tahun yang memiliki akte kelahiran}}{\text{Jumlah penduduk 0-1 tahun}} \times 100\%$	Untuk mengukur jumlah kepemilikan Akta Kelahiran bagi penduduk 0-1 tahun untuk tertib admnistrasi kpendudukan	Dinas Kependudukan
3	Persentase Rumah Tangga bersanitasi	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga memenuhi persyaratan sanitasi}}{\text{Jumlah rumah tangga yg di survey}} \times 100\%$	untuk mengukur prosentase rumah sehat dimana dengan rumah sehat diharapkan penyakit berbasis lingkungan dapt dicegah	Dinas Kesehatan
4	Rumah Tangga pengguna Air Bersih	$\frac{\text{Jumlah rumah tangga yg menggunakan air bersih}}{\text{Jumlah rumah tangga yg diperiksa}} \times 100\%$		
5	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	$\frac{\text{Jumlah PMKS yg mendapat bantuan}}{\text{Jumlah PMKS}} \times 100\%$		Dinas Sosial
6	Sarana sosial seperti Panti Asuhan, Panti Jompo dan Panti Rehabilitasi	Jumlah sarana sosial yg direhabilitasi		Dinas Sosial
7	Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS)	Jumlah Tempat Pembuangan Sementara (TPS) yg dibangun		
8	Penanganan sampah (Ippd)	$\frac{\text{Volume sampah yang ditangani (m3)}}{\text{Volume produksi sampah}} \times 100\%$		Dinas Cipta Karya
9	Indeks Keparahan angka kemiskinan			Badan Pusat Statistik
10	Peningkatan HDI			Badan Pusat Statistik
11	Jumlah korban yang mendapatkan pelayanan penanganan terhadap kasus KDRT			Badan Pemberdayaan Perempuan KB
12	Pembentukan P2TP2A kecamatan	Jumlah P2TP2A yang dibentuk		Badan Pemberdayaan Perempuan KB

<b>Sasaran 9 : Meningkatnya Kesejahteraan Keluarga</b>				
1	Pasangan Usia subur dan akseptor KB baru (kecamatan)			Badan Pemberdayaan Perempuan KB
2	Jumlah perusahaan yang berkomitmen terhadap perlindungan Nakerwan (perusahaan)			Dinas Tenaga Kerja
3	Jumlah desa yang mendapat pembinaan desa prima melalui pelatihan olahan ikan (desa)			BPMPD
4	PKK aktif	$\frac{\text{Jumlah PKK aktif}}{\text{Jumlah seluruh PKK dalam kurun waktu yg sama}} \times 100\%$	Untuk menilai partisipasi masyarakat dalam pembangunan	BPMPD
5	Posyandu aktif	$\frac{\text{Jumlah Posyandu aktif}}{\text{Jumlah seluruh Posyandu dalam wilayah yg sama}} \times 100\%$	untuk mengukur tingkat keaktifan posyandu di masyarakat	
6	Jumlah desa siaga aktif	$\frac{\text{Jumlah Desa siaga aktif}}{\text{Jumlah seluruh Desa siaga dalam wilayah yg sama}} \times 100\%$		

1	2	3	4	5
<b>Sasaran 10 : Tertanamnya Nilai-nilai Budaya yang Sanggup Mengantarkan Setiap Warga Masyarakat Kabupaten Paser Memasuki Dunia Modern dan Era Globalisasi</b>				
1	Angka gangguan keamanan dan ketertiban	$\frac{\text{angka gangguan keamanan tahun lalu} - \text{angka gangguan keamanan tahun ini}}{\text{Angka gangguan keamanan tahun ini}} \times 100\%$		Satpol PP
2	Penanganan kasus pelanggaran perda			Satpol PP
3	Pelanggaran perda yg terselesaikan/mendapat putusan pengadilan			Satpol PP
4	Sosialisasi kerukunan antar umat beragama dikalangan pemeluk agama			
5	Rasio aparat trantib terhadap jumlah penduduk	$\frac{\text{Jumlah aparat trantib}}{\text{Jumlah penduduk dalam wilayah yg sama}} \times 100\%$	untuk mengukur kecukupan kebutuhan trantib terhadap jumlah penduduk	Satpol PP
6	Jumlah fasilitas Seni dan Budaya	Jumlah fasilitas Seni dan Budaya yg dibangun	untuk menilai kecukupan / kelengkapan fasilitas seni dan budaya	Dinas Kebudayaan, Pariwisata , Pemuda & Olahraga
7	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya	$\frac{\text{jumlah festival seni dan budaya yang terlaksana dalam 1 tahun}}{\text{jumlah festival seni dan budaya yang direncanakan dalam 1 tahun yang sama}} \times 100\%$	untuk menilai kinerja dalam upaya melestarikan seni dan budaya lokal	Dinas Kebudayaan, Pariwisata , Pemuda & Olahraga
8	Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	jumlah benda , situs dan kawasan cagar budaya yang dilestarikan dan dilindungi oleh	untuk menilai peran serta pemerintah daerah / pusat dalam melasterikan	Dinas Kebudayaan, Pariwisata , Pemuda &

		daerah/pemerintah		benda, situs dan kawasan cagar budaya	Olahraga
<b>Sasaran 11 : Terjaganya Kawasan Konservasi Sehingga Kawasan Tersebut dapat Berperan dan Berfungsi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat</b>					
1	Jumlah kasus pencemaran lingkungan	Jumlah kasus pencemaran tahunlalu- jumlah <u>Pencemaran tahun ini</u> <i>Jumlah Pencemaran tahun ini</i>	X 100%	untuk menilai tingkat penurunan kasus pencemaran lingkungan	BLH
2	Pemenuhan baku mutu air sungai, limbah industri, limbah rumah sakit	Jumlah usaha/kegiatan sumber tdk bergerak yg telah memenuhi persyaratan admnistrsai & <u>teknis pengendalian pencemaran air</u> <i>Jumlah usaha/kegiatan sumber tdk bergerak yg potensial mencemari air</i>	X 100%	untuk mengukur tingkat partisipasi pelaku usaha terhadap pencegahan pencemaran air sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia	BLH

1	2	3		4	5
3	Pemenuhan baku mutu udara lokasi padat Lalu Lintas, Cerebong Industri	Jumlah usaha/kegiatan sumber tdk bergerak yg telah memenuhi persyaratan admnistrsai & <u>teknis pengendalian pencemaran udara</u> <i>Jumlah usaha/kegiatan sumber tdk bergerak yg potensial mencemari udara</i>	X 100%	untuk mengukur tingkat partisipasi pelaku usaha terhadap pencegahan pencemaran udara sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia	BLH
4	Jml perusahaan yang memiliki Dokumen AMDAL	<u>Perusahaan yg telah memiliki AMDAL</u> <i>Julah perusahaan yang di Data</i>	X 100%	Untuk menilai tingkat partisipasi penanganan AMDAL	BLH
5	perusahaan yang menggunakan IPAL				
6	Ruang Terbuka Hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB				Dinas Bina Marga, Pengairan dan Tata Ruang
<b>Sasaran 12 : Meningkatkan Peran Ekonomi Kerakyatan</b>					
1	Persentase pemberian Pupuk Bersubsidi kepada Petani	<u>Jumlah pupuk bersubsidi yg disalurkan</u> <i>Jumalh lahan pertanian diwilayah yg sama</i>	X 100%	Untuk menilai jumlah lahan yg telah mendapatkan pupuk bersubsidi dalam rangka peningkatan produksi pertanian	Bagian Ekonomi
2	Jumlah pedagang yang tertampung di pasar	<u>Jumlah petak/kios pasar</u> <i>Jumlah pedagang dlm satu wilayah</i>	X 100%	Untuk menilai jumlah pedagang yg melakukan aktifitas di pasar	Dinas perdagangan, koperasi dan UKM
3	Rata-rata pertumbuhan aset dana bergulir SPP PNPM-Mpd (%)				
4	Jumlah BUMDes dalam kategori sehat				
5	Jumlah Pasar Desa Aktif				Dinas perdagangan, koperasi dan UKM
6	Jumlah Kecamatan yang mengelola UP2K (kec)				

7	Jumlah Inovasi TTG yang diciptakan (jenis)			
<b>Sasaran 13 : Terbukanya Wilayah yang Terbelakang, Terpencil dan Daerah Pedalaman dan Berkurangnya Kesenjangan Pembangunan Antar Kawasan (Pedalaman dan Pantai)</b>				
1	Jumlah sarana dan prasarana air bersih pedesaan yang dibangun	sarana dan prasarana air bersih pedesaan yang dibangun		
2	jumlah peningkatan jalan/jembatan/titian/semenisasi dan drainase yang dibangun			Dinas Bina Marga, Pengairan & Tata Ruang
3	pengembangan TIK di perdesaan (fasilitas internet di pedesaan/internet keliling)	Jumlah jangkauan jaringan pelayanan yg masuk <u>hingga ke Pedesaan</u> <i>Jumlah Desa</i>	X 100%	Untuk menilai pemenuhan infrastuktur prasarana dasar kabupaten  Diskominfo

1	2	3	4	5
4	Jml penumpang angkutan umum (awak non awak)	Junmlah penumpang yang terangkut pada tahun yang sama	sebagai focus pelayanan dan optimalisasi jaringan angkutan dalam melayani pergerakan orang dan barang	Dinas Perhubungan
5	Sarana transportasi angkutan perdesaan	Jumlah angkutan pedesaan yang tersedia	Untuk menilai pemenuhan sarana transportasi dasar	Dinas Perhubungan

KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KAB. PASER,

BUPATI PASER,

TTD

H. ANDI AZIS, SH  
Pembina TK I  
NIP

Drs. H. YUSRIANSYAH SYARKAWI, M.Si